

RINGKASAN DISERTASI

**TATA KELOLA DANA DESA BERDASARKAN PRINSIP
AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN
PARTISIPASI PUBLIK
(STUDI DI DESA SIPODECENG KECAMATAN BARANTI DAN
DESA BETAO RIASE KECAMATAN PITU RIAWA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**

***VILLAGE FUND MANAGEMENT BASED ON
ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY AND PRINCIPLES
PUBLIC PARTICIPATION
(STUDY IN SIPODECENG VILLAGE, BARANTI DISTRICT AND
BETAO RIASE VILLAGE, PITU RIAWA DISTRICT,
SIDENRENG RAPPANG REGENCY)***

MUHAMMAD RAIS RAHMAT



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2022**

**TATA KELOLA DANA DESA BERDASARKAN PRINSIP
AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN
PARTISIPASI PUBLIK
(STUDI DI DESA SIPODECENG KECAMATAN BARANTI DAN
DESA BETAO RIASE KECAMATAN PITU RIAWA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapat Derajat

Doktor

Program Studi

Ilmu Administrasi Publik

Disusun dan Diajukan oleh

MUHAMMAD RAIS RAHMAT

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Tata Kelola Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas
Transparansi dan Partisipasi Publik
(Studi Kasus: di Desa Sipodeceng dan Desa Betao Riase
Kabupaten Sidenreng Rappang)

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD RAIS RAHMAT**

No. Pokok : **181060501007**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**

Menyetujui,

Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd.
Promotor

Prof. Dr. Manan Sailan, M.Hum.
Kopromotor

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar,

Prof. Dr. Rifdan, M.Si.
NIP. 19650522 1990031002

Prof. Dr. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 19601231 198503 1 029

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Penulisan disertasi ini merupakan kewajiban akademik yang membutuhkan perjuangan dan semangat serta kesabaran dan ketabahan dalam rangka menyelesaikan studi Program Doktorat untuk mencapai gelar Doktor Administrasi Publik.

Sebagai ungkapan rasa bahagia, Peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd., selaku Promotor/Ketua Tim Penguji dan Bapak Prof. Dr. Manan Sailan, M.Hum. selaku Kopromotor/Sekretaris Tim Penguji. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim penguji, yaitu Dr. Andi Sulaiman Samad, M.Si., Bapak Dr. Rifdan, M.Si., Bapak Prof. Dr. Chalid Imran Musa, M.Si.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar.
2. Prof. Dr. Hamsu Abdul Gani, M.Pd. sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar.
3. Prof. Dr. Rifdan, M.Si. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik serta Staf Tata Usaha Podi Ilmu Administrasi Publik Program Pasca sarjana Universitas Negeri Makassar.

4. Rektor beserta civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Perempuan (DPMDPPA) Kabupaten Sidenreng Rappang beserta Staff.
6. Kepala Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang beserta Sekretaris Desa dan staf atas segala bantuan selama peneliti melaksanakan penelitian.
7. Kepala Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang beserta Sekretaris Desa dan Staff atas segala bantuan selama Peneliti melaksanakan penelitian.
8. Para Dendamping Desa Kecamatan Baranti dan Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018 atas segala kebersamaan yang telah dibangun, ilmu yang telah dibagi selama belajar di Program Pasca Sarjana.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus, peneliti sampaikan kepada kedua orang tua saya almarhum Ettaku Drs. Abd. Razak Arsyad, Endaeku almarhuma Haja Siti Rusdiah Thaiyyeb, Kedua Almarhum mertua saya Drs. A. Basri Andi Massapaila dan Haja Nurlaela Patunrangi Isteri tercinta Indriati Purnamasari Basri Massapaila, S.H., anakku tercinta Hammam Fauzan Hawari Rais dan Tazkia Ramdini Rais. Saudara saudariku; Keluarga Dra. Rasdiana Razak/Dr. Ir. M. Darwis Lantik, M.Pt., keluarga Ir.H. Rustam Effendi/Ir. Rahmawati Dollah, keluarga Ir. Rusman Razak/Andi Juniati, keluarga Ir. Tarbiyani Razak/Ir.

Zulkifli, keluarga Rosmaladewi, S.E., para wija Andi Tanri Toalala Arung Enrekang VIII, keluarga besar Takkini-Makkawaru, keluarga besar Muhammadiyah Boarding School Rappang, para Dosen dan Staf Fakultas Sains Teknologi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta seluruh keluarga besar LKSA Panti Asuhan Sejati Muhammadiyah Rappang yang senantiasa kebersamai dan mendukung saya dalam penyelesaian studi ini.

Harapan peneliti, semoga segala bantuan, petunjuk, dorongan, pengorbanan dan doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada peneliti sehingga memungkinkan selesainya disertasi ini, dapat bernilai ibadah disisi Allah Rabbul Alamin dan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda disisiNya, Amiin

Makassar, 24 Nopember 2022



MUHAMMAD RAIS RAHMAT
NIM 181060501007

ABSTRAK

Muhammad Rais Rahmat, 2022. Tata Kelola Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik (Studi di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti dan Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang). (Promotor dan Kopromotor, Arismunandar dan Manan Sailan).

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengkaji dan menjelaskan penyebab belum efektifnya penerapan Tata Kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik di Desa Sipodeceng dan Desa Betao Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. 2) Untuk mengkaji dan menjelaskan model dalam Penerapan Tata Kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik di Desa Sipodeceng dan Desa Betao Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dengan koleksi data, reduksi data, penyajian dan dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public di Desa Sipodeceng dan Desa Betao Riase Kabupaten Sidenreng Rappang belum dapat diterapkan secara efektif. 2) Model Tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik, yaitu memperluas cakupan petanggungjawaban, dimulai pada moralitas dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Perluasan transparansi dengan mencantumkan kontak person pada baliho program, dalam hal partisipasi, membuat angket usulan dan evaluasi program serta membuat pemetaan kondisi sosial masyarakat dalam penggunaan Dana Desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Partisipasi publik, Transparansi.

ABSTRACT

Muhammad Rais Rahmat, 2022. Village Fund Management Based on the Principles of Accountability, Transparency and Public Participation (Study in Sipodeceng Village, Baranti District and Betao Riase Village, Pitu Riawa District, Sidenreng Rappang Regency). (Promoter and Co-promoter, Arismunandar and Manan Ceylon).

This study aims: 1) To examine and explain the causes of the ineffective implementation of Village Fund Governance based on the principles of accountability, transparency and public participation in Sipodeceng Village and Betao Riase Village, Sidenreng Rappang Regency. 2) To examine and explain the model in the Implementation of Village Fund Governance based on the principles of accountability, transparency and public participation in Sipodeceng Village and Betao Riase Village, Sidenreng Rappang Regency. The type of research used is qualitative with a phenomenological approach. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation. Analysis technique with data collection, data reduction, presentation and conclusion drawing.

The results showed that; 1) Village Fund governance based on the principles of accountability, transparency and public participation in Sipodeceng Village and Betao Riase Village, Sidenreng Rappang Regency has not been implemented effectively. 2) The Village Fund Governance model is based on the principles of accountability, transparency and public participation, namely expanding the scope of accountability, starting with morality and improving human resource capabilities. Expansion of transparency by including contact persons on program billboards, in terms of participation, making a proposal questionnaire and program evaluation as well as mapping the social conditions of the community in the use of Village Funds.

Keywords: Accountability, Village Funds, Public Participation, Transparency.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	vi
ABSTRAK (Indonesia)	x
ABSTRAC	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	4
A. Tata Kelola Dana Desa	4
B. Kakuntabilitas	4
C. Transparansi	5
D. Partisipasi Publik	6
E. Teori Efektifitas	6
F. Prototype Model	6
G. Penelitian Terdahulu	7
H. Kerangka Konsep	7
BAB III METODE PENELITIAN	9
A. Lokasi dan Jenis Penelitian	9
B. Pendekatan Penelitian	10
C. Sumber Data dan Informan	10
D. Fokus dan Deskripsi Fokus	11
E. Instrumen Penelitian	12
F. Teknik Pengumpulan Data	12
G. Pengecekan Keabsahan Data	12
H. Teknik Analisis Data	13
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	15
A. Kabupaten Sidrap dalam Lintasan Sejarah	15
B. Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti	15
C. Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa	15

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	16
1. Penerapan Tata Kelola DD Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik	16
2. Model Tata Kelola Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik.	20
B. Pembahasan	22
1. Penerapan Tata Kelola DD Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik.	22
2. Model Ideal Penerapan Tata Kelola DD Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik.	24
a. Tata kelola DD berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public secara bersama.	24
b. Rekomendasi Kebaruan Hasil Penelitian	25
1) Proposisi minor pertama	29
2) Proposisi minor kedua	29
3) Proposisi minor ketiga	29
4) Proposisi mayor	29
5) Novelty (kebaruan) temuan penelitian	30
	33
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	33
B. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	35
Daftar Riwayat Hidup	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Dana Desa telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 sebesar Rp20,67 triliun dan terus meningkat, tahun 2016 naik menjadi Rp46,98 triliun, serta masing-masing Rp60 triliun pada tahun 2017 dan 2018 yang di alokasikan per tahun untuk menggalakkan pembangunan dan memajukan desa. Pengelolaan Dana Desa, diharapkan dapat dikelola dengan baik sesuai dengan amanat undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 20 poin d, g k dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan Desa pasal 2 ayat 1, bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif”.

Data penilaian status desa tahun 2020 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Perempuan (DPMDPPA) Kabupaten Sidrap, diperoleh angka Indek Desa Membangun (IDM) yang digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melihat efektifitas penggunaan Dana Desa. Hasil penilaian menunjukkan bahwa, hingga tahun 2019, dari 68 desa di Kabupaten Sidrap masih ada 4 desa tergolong dalam kategori status Desa Tertinggal sedangkan lebih 50 prosen desa berhasil migrasi status dari Desa Tertinggal dan Berkembang menjadi Desa Maju, Sehingga pengelolaan program Dana Desa ini masih perlu diperbaiki.

Fakta dan fenomena ini memberikan celah riset untuk diteliti lebih jauh penyebab belum efektifnya penerapan tata kelola Dana Desa

berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public serta model ideal yang bisa diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa khususnya di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti dan Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Penerapan Tata Kelola Dana Desa belum efektif berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti dan Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bagaimana Model Ideal Penerapan Tata Kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti dan Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji dan menjelaskan;

1. Penyebab belum efektifnya penerapan Tata Kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti dan Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Model dalam Penerapan Tata Kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti dan Desa Betao Riawa Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang..

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi pedoman bagi para penentu dan pelaksana kebijakan pengelolaan Dana Desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, khususnya Pemerintah Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti dan Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, terkait dengan Pengelolaan Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public.

2. Manfaat teoritis,

- a. Sebagai referensi bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, khususnya Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti dan Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam rangka perumusan dan pelaksanaan program Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik.
- b. Diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah khasanah dan perspektif baru dalam pengembangan wacana ilmu administrasi public.
- c. Sebagai referensi tentang implementasi kebijakan, khususnya implementasi pengelolaan Dana Desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tata Kelola Dana Desa

Tata kelola Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa; “Pengelolaan Dana Desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa“. kemudian diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 poin 6, bahwa; “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

B. Akuntabilitas

Secara umum, Akuntabilitas (*accountability*) dalam pemerintahan desa adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban. Menurut LAN dan BPKP dalam (Astuti and Yulianto (2016), bahwa; “dalam pelaksanaan akuntabilitas tata kelola Dana Desa perlu diperhatikan indikator, (h.5) sebagai berikut: 1). Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf. 2) Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten. 3) Laporan Kemajuan, 4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, hasil dan manfaat yang diperoleh, 5) Menjaga Sikap (jujur, objektif, transparan dan

inovatif). Akuntabilitas dalam konsep *New Public Governance* (NPG) merupakan perkembangan terbaru dari teori tentang *governance*.

Menurut S. P. Osborne (2010, h.135). dalam bukunya “*The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*”, menyatakan bahwa; Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dapat dipahami sebagai suatu relasi atau hubungan yang bersifat dua arah. Akuntabilitas tidak hanya terbatas, memberikan laporan pertanggungjawaban ataupun akses informasi. Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana relasi antara pemberi laporan dan penerima laporan, sehingga pertanggungjawaban tercipta bukan karena adanya saling memanipulasi atau sekedar menjawab pertanyaan dan menyiapkan data yang diminta tapi, akuntabilitas berdasar pada adanya hubungan kepercayaan antar para pihak.

C. Transparansi

Pengertian transparansi menurut Bappenas (2003) adalah; Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dilakukan berdasarkan prinsip transparan dan dapat diukur melalui sejumlah indikator”. (Astuti and Yulianto, 2016, h.10), sebagai berikut:

1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan adanya standarisasi. 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan public. 3) Tersedia ruang terbuka, dan setiap orang berhak dan memiliki akses. 4) Mekanisme memfasilitasi pelaporan dan penyebaran informasi.

Transparansi menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan perbaikan tata kelola Dana Desa, dan perlunya ada standarisasi. Menurut Arismunandar (2006), bahwa; “Salah satu upaya untuk meningkatkan

transparansi adalah mengembangkan rencana dan standarisasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan diluar dari aturan yang baku. Upaya lainnya meningkatkan partisipasi stakeholders” (h.35).

D. Partisipasi Publik

Menurut Totok Mardikanto (2013) “Untuk mengamati tingkat partisipasi masyarakat, ada empat hal perlu dicermati (Razak and Harfiah, 2018, h.480) yaitu; 1) Partisipasi dalam identifikasi masalah, 2) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 3) Partisipasi dalam pelaksanaan, 4) Partisipasi dalam evaluasi.

E. Teori Efektifitas

Secara umum efektifitas dari sebuah proses dapat disimpulkan, sejauh mana kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan di awal dengan hasil yang diperoleh, secara singkat (Mardiasmo, 2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif (h.134).

F. *Prototype Model*

Pembuatan model ideal Tata kelola Dana Desa, menggunakan pengembangan pada model prototype. Menurut (Pressman, 2012) “Paradigma model prototype dapat dikembangkan pada 5 tahapan, dapat dilakukan secara linear atau berurutan yaitu; 1) *Communication*, 2)

Quick Plan, 3) Modeling Quick Design, 4) Construction of Prototype, 5) Deployment Delivery and Feedback". (Effendy and Sopiah, 2017, h.32).

G. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu tentang; pengelolaan Dana Desa di Desa Ponorogo.

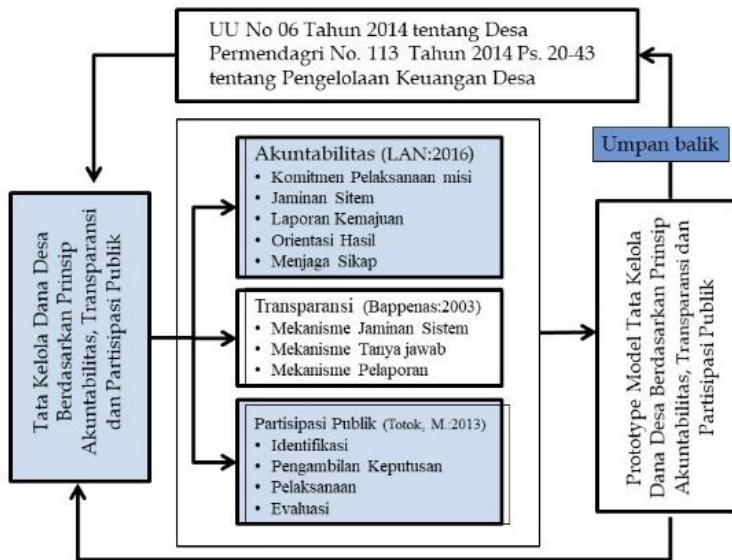
Peneliti Wafirotin and eptiviastuti (2019:42) menyimpulkan bahwa; dengan, persamaan regresi linier berganda pertama dengan menguji pengaruh transparansi, partisipasi dan akuntabilitas secara parsial pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo ditemukan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Secara umum dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa, akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh besar pada tata kelola Dana Desa.

H. Kerangka Konsep

Pendekatan fenomenologi yang menjadi acuan dari penelitian tentang Tata Kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public. Merancang prototype model tata kelola Dana Desa seperti ditunjukkan pada gambar 2.1, merupakan implementasi dari kebijakan, Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20 sampai pasal 43 dengan berdasarkan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang meliputi;

komitmen pelaksanaan misi, jaminan system, laporan kemajuan, orientasi hasil dan menjaga sikap, penerapan prinsip transparansi meliputi; mekanisme jaminan system, tanya jawab dan pelaporan dan penerapan prinsip partisipasi public meliputi; identifikasi, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi.



Gambar 2.1 Kerangka Konsep
Sumber: diolah dari berbagai data.

Prototype model tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Jenis Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti dan Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Kedua desa ini dipilih dengan pertimbangan;

- a. Desa Sipodeceng, setelah menerima Dana Desa lebih 5 tahun sejak tahun 2015, mampu meningkatkan status desanya dari Desa Berkembang menjadi Desa Maju.
- b. Desa Betao Riase, setelah menerima Dana Desa lebih 5 tahun sejak tahun 2015 belum mampu memperbaiki status desanya, masih tetap status Desa Tertinggal.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pertimbangan;

- a. Instrument penelitian adalah Peneliti sendiri, sehingga Peneliti bisa lebih banyak menggali dan mendalami focus.
- b. Bisa mendapatkan gambaran realitas, terkait dengan tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public.
- c. Hubungan dengan informan lebih akrab sehingga bisa diperoleh pemahaman yang mendalam terkait dengan focus penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang berkembang pada Pemerintahan Desa, Aparat Desa dan masyarakat desa terkait dengan Tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public di Desa Sipodeceng dan Desa Betao Riase. Melalui pendekatan fenomenologi maka informasi yang didapat akan lebih lengkap, mendalam dan dapat dipercaya. Dan dapat diperoleh informasi yang bersifat perasaan, norma, nilai, keyakinan, sikap mental, serta budaya dan kebiasaan yang dipegang oleh seseorang maupun oleh kelompok.

C. Sumber Data dan Informan

1. Sumber Data

Sumber data adalah asal atau tempat ditemukannya data, sumbernya dari Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti dan Desa Betao Riase Kecamatan Betao Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah unsur-unsur dari Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti dan Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari; Kepala Desa, Aparat Desa, Ketua/Anggota BPD, Kepala Dusun, Masyarakat serta pegawai dari dinas pemberdayaan desa.

D. Fokus dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka focus diarahkan pada tata kelola Dana Desa dan model ideal tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public.

2. Deskripsi Fokus

a. Tata kelola Dana Desa disini memiliki pengertian yaitu; pengelolaan Dana Desa yang dilakukan berdasarkan prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi public di Desa Sipodeceng dan Desa Betao Riase dengan indikator sub focus:

- 1). Tata kelola Dana Desa dengan indikator; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- 2). Akuntabilitas dengan indikator; komitmen pelaksanaan misi, jaminan system, laporan kemajuan, orientasi hasil, menjaga sikap.
- 3). Transparansi dengan indikator; mekanisme jaminan system, mekanisme tanya jawab, mekanisme pelaporan
- 4). Partisipasi public dengan indikator; identifikasi, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi.

b. Model ideal dibuat, karena belum ada standar tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public di Desa Sipodeceng dan Desa Betao Riase.

E. Instrumen Penelitian

.Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; pedoman observasi, pedoman wawancara dan telaah berbagai dokumen terkait dengan focus penelitian serta penggunaan alat-alat; Buku catatan, Laptop, Camera hand phone, alat perekam, alat tulis menulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan 3 teknik Teknik pengumpulan

G. Observasi

Kegiatan observasi adalah merupakan pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang bersumber dari kegiatan, tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public. Kegiatan yang dimaksudkan adalah peristiwa yang sedang berlangsung pada saat penelitian atau peristiwa di waktu sebelum atau hasil dari sebuah peristiwa pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan regulasi yang masih berlaku untuk Tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini berdasar pada tiga komponen yaitu; tempat, pelaku, dan aktifitas tata kelola Dana Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan alat untuk mendapatkan informasi yang diperoleh sebelumnya. Wawancara digunakan dalam proses

pengambilan data dengan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara peneliti dengan informan yang berhubungan dengan indikator penelitian.

3. Dokumen

Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Analisis berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari informan sekaitan dengan tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data yang tepat, salah satu tekniknya yaitu dengan proses; triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi *member check*. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang relevan dengan substansi penelitian ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang diperoleh.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian ini, khususnya dalam mendapatkan *novelty* atau kebaruan yang dapat digunakan sebagai temuan. Data dari penelitian masih berupa

data mentah, data ini akan memberikan arti dan makna jika diberikan penafsiran dan analisis yang tepat.

Data hasil penelitian akan menuntun peneliti ke arah temuan ilmiah. Analisis data yang dilakukan meliputi proses; mengurutkan data, mengelola dan mengorganisir ke dalam suatu pola, kategori. Proses ini dapat dilakukan dengan memilah-milah data, kemudian melakukan kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang muncul.

Langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut;

1. Reduksi data, yaitu proses memilah-milah data, menggolongkan, mengarahkan dan membuang, data yang tidak perlu kemudian mengorganisasikan kembali data dengan cara sedemikian rupa hingga memiliki kesimpulan dan verifikasi.
2. Penyajian data, data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen, hasil wawancara dan hasil observasi dianalisis kembali sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang Tata kelola Dana Desa yang dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Dan dapat menyajikan model ideal.
3. Penarikan kesimpulan, tahapan ini merupakan hasil akhir dari proses analisis data, di mana peneliti menarasikan hasil penelitian dengan medeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Kabupaten Sidenreng Rappang

Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti dan Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa adalah dua desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang atau disingkat dengan Kabupaten Sidrap, biasa dikenal sebutan “Bumi Nene Mallomo”, diambil dari namatokoh lengendaris ke-Addatuang Sidenreng dan Akkarungeng Rappang.

B. Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti

Desa Sipodeceng adalah salah satu dari 68 desa yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang atau salah satu Desa dari 4 desa yang ada di Kecamatan Baranti. Dan terdiri dari 3 dusun yaitu, Dusun Bungin, Dusun Padaccengnga dan Dusun Dea.

C. Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa

Desa Betao Riase adalah bagian dari Kecamatan Duapitue. Setelah terjadi pemekaran, Kecamatan Duapitue dimekarkan menjadi 3 kecamatan, yaitu; Kecamatan Duapitue, Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase. Desa Betao Riase masuk dalam salah satu wilayah Kecamatan Pitu Riawa Bersama dengan 10 desa dan kelurahan lainnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik.

a. Tata kelola dana desa

Pada awal periode penelitian dilakukan, yaitu agustus 2020, pencairan tahap pertama Dana Desa telah dilakukan dan bahkan beberapa desa telah melaksanakan programnya sesuai dengan ketentuan.

Tabel 5.1 Pelaksanaan Tata Kelola Dana Desa.

Sumber : Pengolahan hasil penelitian

No	TKDD	Desa Sipodeceng	Desa Betao Riase
1.	Perencanaan	Perencanaan diawali dengan identifikasi pada MUSDUS dan MUSDES.	Pembahasan awal pada Musdus kemudian dilanjutkan ke Musdes untuk penentuan prioritas program
2.	Penatausahaan	Melibatkan PTPKD yang memiliki pemahaman baik	PTPKD masih terus belajar dan butuh pendampingan
3.	Pelaporan	Pelaporan sesuai petunjuk teknis	Pelaporan yang masih terkendala oleh laporan tahapan sebelumnya
4.	Pertanggung-jawaban	Dapat dipertanggungjawabkan dengan baik	Menunggu perbaikan dan pelaporan dari tahapan sebelumnya.

b. Tata kelola dana desa berdasarkan prinsip akuntabilitas

1). Desa Sipodeceng

Penerapan akuntabilitas tidak hanya terbatas pada penyiapan bukti kwitansi pembayaran tapi, kegiatan itu harus sesuai dengan Misi

dan Tujuan dari sebuah program dan adanya jaminan sistem. Seperti diungkapkan Naming, bahwa;

Pada awal program Dana Desa yaitu tahun 2015 sampai dengan 2018, ada Tim evaluasi yang selalu memonitoring dan mengevaluasi setiap tahapan pencairan untuk melaksanakan evaluasi terhadap penggunaan anggaran. Tim ini dibentuk oleh Bupati, namun sejak tahun 2019 Tim ini sudah tidak ada. Desa sebenarnya sangat membutuhkan adanya Tim yang bisa memberikan pembinaan (Wawancara, 28 Agustus 2020)

2). Betao riase

Desa Betao Riase yang memiliki berbagai keterbatasan, utamanya dalam hal infrastruktur jalan dan jaringan komunikasi, seperti diungkapkan oleh Suardi bahwa;

Memang tetap dimungkinkan untuk terjadinya perubahan program yang menyimpang dari Misi dan Tujuan awal, namun perubahan-perubahan itu tetap diawali dengan bermusyawarah dengan masyarakat lewat BPD dan Kepala Dusun. Tapi sebenarnya ada ironisnya karena Penggunaan Dana Desa hanya untuk jalan tani, maka yang terjadi di lapangan. Lorong-lorong dan jalan taninya bagus tapi jalan utamanya malah rusak. (Wawancara, 15 September 2020).

c. Tata kelola dana desa berdasarkan prinsip transparansi

1). Desa Sipodeceng

Bagi Kepala Desa Sipodeceng, menurutnya prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting dan sudah dijalankan dengan baik, Menurut Naming bahwa;

Prinsip transparansi sudah dijalankan, awal bekerja pasang baliho di depan Kantor Desa, setelah penetapan agar masyarakat melihat selama pelaksanaan kegiatan. Sedangkan kalau ada yang bertanya biasanya kami pertanggungjawaban secara kolektif . Mengenai kontak telpon di baliho, kami mengakui memang belum ada karena kami pikir mereka tidak ada kesulitan berkomunikasi dengan aparat atau Kepala Desa. (Wawancara, 9 Oktober 2020).

Keterangan Naming dengan metode *confirmability* dan *transferability* juga diperkuat oleh Andi bahwa; “ Setiap program yang dibuat oleh Kepala Desa khususnya terkait dengan Dana Desa selalu terbuka dengan BPD, dan kami sering berdiskusi”. (Wawancara, 10 Oktober 2020

Kedua pendapat orang penting di Desa Sipodeceng tersebut kemudian dibawa ke Forum Group Discussion (FGD) untuk dilakukan triangulasi baik dengan sumber berbeda maupun dengan waktu berbeda dapat disimpulkan bahwa setiap program yang dijalankan di Desa Sipodeceng telah dijalankan berdasarkan pada prinsip-prinsip transparansi seperti yang disebutkan oleh BPK, yaitu adanya kemudahan akses bagi warga untuk melakukan *croscek* dan verifikasi, namun ada juga pendapat bahwa indikator kemudahan akses atau ruang untuk konfirmasi selama ini masih terbatas pada konfirmasi lewat pertemuan warga, atau bincang lepas di luar kantor dengan bertanya langsung kepada aparat, BPD atau ke Kepala Desa.

2). Betao Riase

Pemaknaan transparansi, menurut BPKP, tidak hanya terbatas pada adanya keterbukaan, tapi juga harus ada kemudahan akses dan Ringkasan Disertasi

Muhammad Rais Rahmat

setiap warga memiliki akses itu, dapat bertanya atau mengkonfirmasi dengan mudah dan tanpa ada tendensi lain. Kondisi Pemasangan baliho di Betao Riase, dimana dalam satu baliho terdapat beberapa informasi program selain Dana Desa yang dibiayai oleh APBN, juga ada dan digabung dengan program Alokasi Dana Desa (ADD) dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

d. Tata kelola dana desa berdasarkan prinsip partisipasi publik

1). Desa Sipodeceng

Model partisipasi yang ada di Desa Sipodeceng dimaknai dengan adanya kegiatan mengundang tokoh-tokoh masyarakat melalui Musyawarah Dusun, tanpa melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian dirumuskan dalam bentuk kesepakatan Musdus untuk dibawa ke forum di atasnya yaitu Musyawarah Desa. Pelibatan masyarakat di tingkat dusun hendaknya melibatkan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan seperti mereka yang penyandang cacat ataupun keterwakilan kaum perempuan.

2). Desa Betao Riase

Pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yaitu melibatkan partisipasi publik, dimulai dari MUSDES sampai dengan MUSDES. Persoalan utama masyarakat di Desa Betao Riase adalah persoalan infrastruktur jalan utama yang buruk dan tidak ada jaringan komunikasi, namun persoalan infrastruktur tidak dapat ditangani dan diusulkan sebagai program Dana Desa karena Ringkasan Disertasi

Muhammad Rais Rahmat

terbentur dengan petunjuk teknis. Sehingga masyarakat harus bisa melihat program lain yang dapat diselesaikan dengan menggunakan Dana Desa.

e. Efektifitas Penerapan Tata Kelola Dana Desa

Penerapan tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public, dianggap belum efektif karena menurut mardiasmo (2017) efektifitas terjadi jika terjadi kesamaan antara tujuan dengan hasil di lapangan (h.134).

2. Model tata kelola dana desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public.

Pada penyusunan prototype model ideal Tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public.

a. Tahap *communication*

Pada tahap ini, baik Kepala Desa maupun dengan Ketua BPD dan Pendamping Desa di Desa Sipodeceng dan Desa Betao Riase memiliki kesepahaman yang sama tentang perlunya model penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan Dana Desa.

b. Tahap *quick plan*

Kedua desa sependapat bahwa dalam pengelolaan Dana Desa ini, diperlukan integritas dan moralitas yang baik oleh seluruh yang terlibat dalam menjalankan program ini. Jadi pertanggungjawaban itu tidak

hanya kepada pemeriksa tapi yang paling penting adalah Kepada Allah SWT. Selanjutnya bentuk moralitas apa yang paling cocok dilakukan, karena selama ini kedua desa hanya memanfaatkan kegiatan pengajian di Masjid untuk mengingatkan dan memberikan nasihat tentang perlunya menjaga amanah yang baik.

c. Tahapan *modeling quick design*

Pada Tahapan disain model ada kesepahaman antara dua desa, bahwa dalam prinsip transparansi perlu ada pengawasan melekat kepada pelaksana dan pertanggungjawaban tidak hanya sebatas pada menyiapkan dokumen. Sedang untuk transparansi ada kesepahaman bahwa prinsip keterbukaan tidak hanya terbatas pada pemasangan baliho saja perlu dibuka akses yang luas dan ada standar. Sedangkan partisipasi public, diakui bahwa selama ini sangat sulit untuk menghadirkan semua. Dan yang dilaksanakan, terbatas pada MUSDUS dan MUSDES.

d. Tahap *construction of prototype*

Penyusunan konstruksi prototype model, ada kesepahaman bahwa perlu ada pengembangan pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public. Sunandar menyarankan;

Selama ini prinsip transparansi masih dijalankan setengah hati, hanya sekedar memasang baliho dan sebaiknya baliho itu tersendiri untuk Dana Desa tidak dicampur dengan yang lain, kemudian perlu ditambahkan kontak person dan nomornya. Kemudian untuk partisipasi sebaiknya melibatkan seluruh masyarakat tanpa terkucuali, jadi solusi yang paling bisa adalah dengan membuat angket. (Wawancara, 8 Oktober 2020).

Pendapat dari Sunandar, mendapat dukungan dari Naming bahwa;

Saya kira tidak masalah membuat fakta integritas oleh petugas, karena itu khan memang sudah seharusnya, sedangkan baliho saya kira memang harus seperti itu karena terkadang warga agak segan benrtanya langsung ke Kepala Desa atau BPD untuk angket yang jadi pertimbangan ini masalah kertasnya, darimana lagi anggarannya. (Wawancara, 10 Oktober 2020).

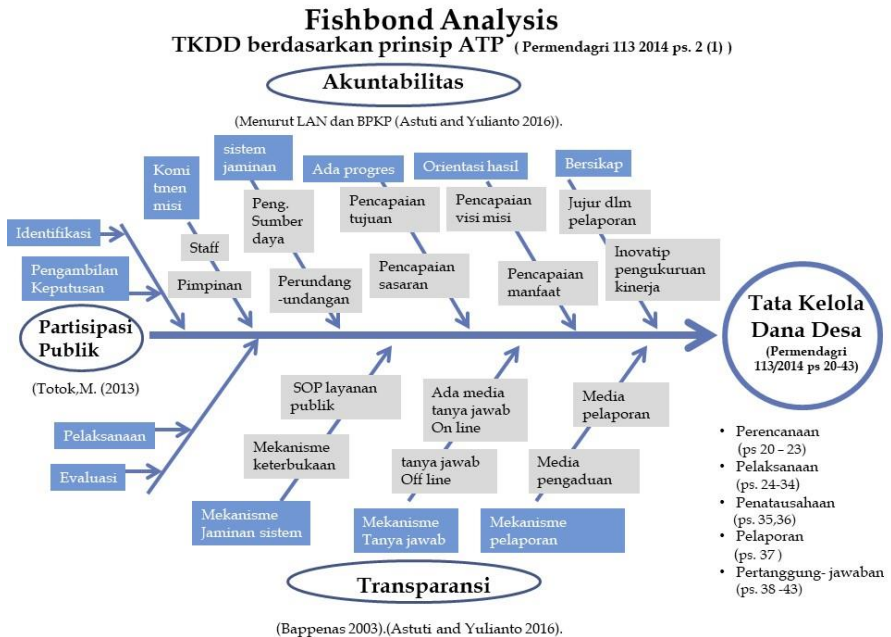
e. Tahap *deployment delivery and feedback*

Pada tahapan kelima, yaitu *Deployment Delivery and feedback*. Kedua Kepala Desa mengakui model prototype ini bisa dijalankan, hanya perlu didiskusikan dan minta persetujuan terlebih dahulu dengan BPD dan aparat desa dan warga yang terlibat dalam program Dana Desa. termasuk dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Dinas dari pemberdayaan desa.

B. Pembahasan

1. Penerapan Tata Kelola Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik.

Untuk menelusuri dan mengamati penerapan tata kelola Dana Desa, diawali dengan mengurai kembali sub focus yaitu Akuntabilitas dengan 5 indikator, taransparansi dengan 3 indikator, partisipasi 4 indikator dan tata kelola 5 indikator. Lebih jelasnya, digambarkan dalam bentuk *fishbond* atau sirip ikan.



Gambar 5.1 Analisa Sirip Ikan (*Fishbond analysis*) pada 4 sub focus
Sumber: hasil pengolahan study literatur

a. Tata kelola dana desa berdasarkan prinsip akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa tidak hanya terbatas pada integritas yang dimiliki oleh Aparat Desa, tapi harus dibarengi dengan faktor kemampuan SDM, yang dapat mempertanggungjawabkan baik secara horisontal maupun vertikal. sesuai hasil penelitian Utomo (2018) bahwa; “pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dilakukan dalam bentuk forum musyawarah desa dan pertanggungjawaban”. Naming dan Suardi juga mengakui bahwa, penata kelolaan Dana Desa berdasarkan prinsip Akuntabilitas akan meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran.

b. Tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip transparansi

Konsep transparansi yang berjalan sekarang baru sebatas pengumuman ke publik dengan memasang papan baliho di depan Kantor Desa. hal ini juga dipertegas oleh Sunandar bahwa;

Tingkat transparansi masih rendah baik di Desa Sipodeceng maupun Desa Betao Riase karena belum adanya ruang tanya jawab yang disiapkan dalam bentuk pencantuman nomor kontak telepon pada baliho (Wawancara, 11 Oktober 2020).

c. Tata kelola dana desa berdasarkan prinsip partisipasi publik

Partisipasi publik dalam tata kelola dana desa tidak hanya sekedar seremonial belaka, tapi harus bisa melibatkan semua komponen masyarakat. seperti disampaikan oleh Sunandar bahwa;

Model partisipasi publik harus bisa melibatkan kaum marginal dan cacat sehingga DD harus dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Usulan harus terkait dengan penanganan kemiskinan dan orang cacat, sehingga akan diperoleh pemetaan kondisi masyarakat setiap desa. (Wawancara, 11 Oktober 2020).

2. Model Ideal Tata Kelola Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik.

a. Tata kelola dana desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public secara bersama-sama

Pengelolaan Dana Desa akan memberikan hasil lebih jika prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dijalankan secara bersama-sama karena ketiganya memiliki keterkaitan seperti yang dipaparkan Dadang Solihin, pada diagram dibawah.



Gambar 5.2 Keterkaitan Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi
Sumber: di olah ulang dari dadang-solihin.blogspot.com

b. Rekomendasi kebaruan hasil penelitian

Untuk mengkompilasi berbagai hasil penelitian terdahulu dengan hasil pengamatan di lapangan perlu dilakukan beberapa sintesa dengan mengkhususkan beberapa indikator yang menjadi acuan dalam meneliti setiap focus yang dipilih. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa perlu dibangun dari moralitas yang kuat, pertanggungjawaban Dana Desa tidak hanya diselesaikan dengan adanya persetujuan formal dari pemeriksa tapi lebih dari itu. Aspek kejujuran dan sangat berperan penting dalam meningkatkan nilai akuntabilitas yang dibangun antara yang diperiksa dan pemeriksa. Pertanggungjawaban tidak terbatas hanya pada pertanggungjawaban formil, antara sesama manusia. Seperti ditunjukkan pada tael 5.2 dibawah:

Tabel 5.2 Sintesa Penelitian (1)
Sumber : Hasil pengolaan data

Deskripsi	Teori & Konsep	Kondisi di lapangan	Sintesa
TKDD berda-sarkan Prinsip Akunta-bilitas	• Komitmen pelaksanaan • Jaminan sistem • Laporan Kemajuan • Orientasi Hasil • Menjaga sikap	Setiap program yang diusulkan dikerjakan, dipertanggungjawabkan oleh petugas dan penyiapan bukti fisik dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis, hanya untuk Desa Betao Riase karena kendala infrastruktur sehingga pelaporan masih sering terlambat. Pertanggungjawaban masih sebatas petugas dengan pemeriksa	Prinsip akuntabilitas dimulai saat merencanakan program kegiatan, dengan memperhatikan: >Konsisten pada tujuan awal. >Ada mekanisme pelaporan >Moralitas >Kemamfaatan

Pemaknaan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa tidak hanya sebatas memasang baliho kegiatan sebagai simbol transparansi. Juauh lebih penting dari semua itu adalah bagaimana masyarakat bisa melakukan umpan balik terhadap informasi yang dibuka. Pada kasus ini Peneliti memandang perlu ada mekanisme transparansi yang dapat membuka seluas-luasnya dan warga bisa melihat dengan terang benderang, jika ada yang perlu dipertanyakan. Warga dengan mudah dan leluasa bisa bertanya dan melakukan kroscek. Salah satu cara dengan mencantumkan nomor telepon nara hubung pada baliho yang dipasang.

Tabel 5.3 Sintesa Penelitian (2)
Sumber : Hasil pengolahan data

Deskripsi	Teori	Kondisi di lapangan	Sintesa
TKDD berdasarkan Prinsip Transparansi	• Jaminan sistem • Tanya jawab • Pelaporan	Program DD diproses, mengajukan usul masyarakat lewat MUSDUS dan disepakati di MUSDES untuk diajukan ke Kecamatan dan Kabupaten, hasilnya diumumkan lewat baliho bersama dengan program yang di danai dari sumber lain.	>Datapendukung >Dibuat standar transparansi, ada akses tanya jawab. >Informasi ke publik secara khusus tidak digabung dengan program lain >Progres dan laporan akhir, vertikal, horisontal.

Prinsip partisipasi publik, kebanyakan hanya dimaknai dengan simbolik, yaitu dengan hadirnya perwakilan atau tokoh masyarakat dalam setiap pertemuan. Faktanya dalam masyarakat desa terdiri dari berbagai kelompok, termasuk kelompok pendukung Kepala Desa atau Kelompok yang berbeda. Begitu juga dengan kelompok marginal, seperti penyandang disabilitas atau kaum marginal lainnya. Sehingga partisipasi warga tidak hanya terbatas pada keterlibatan kelompok masyarakat pada kegiatan MUSDUS atau MUSDES. Peneliti memandang perlu ada

identifikasi dalam bentuk seperti penyebaran angket kepada seluruh warga. Sehingga partisipasi warga dapat terwakili dengan baik.

Tabel 5.4 Sintesa Penelitian (3)

Sumber : Hasil pengolahan data

Deskripsi	Teori	Kondisi di lapangan	Sintesa
TKDD berda-sarkan Prinsip Partisipasi Publik	>Identifikasi >Pengambilan keputusan >Pelaksanaan >Evaluasi	Identifikasi program DD dimulai dari Dusun kemudian diputuskan dalam MUSDES. Pelaksana, diutamakan masyarakat desa, kecuali untuk pekerjaan yang khusus, di alihkan ke orang yang ada di luar. desa. Khusus untuk Desa Betao Riase, diharapkan agar sebagian program untuk perbaikan infrastruktur yang menjadi permasalahan utama desa ini.	Partisipasi publik diharapkan bisa menyentuh seluruh masyarakat seperti penderita cacat atau mereka yang tidak terberdayakan. • Penyebaran angket usulan ke semua warga - MUSDUS, untuk membahas hasil angket untuk ditetapkan menjadi usulan Dusun • MUSDES, menetapkan skala prioritas. • Pelaksanaan melibatkan seluruh masyarakat • Dampak program terhadap masyarakat • Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dengan menyebarkan angket dan dibahas dalam Musdus dan Musdes

1). Proposisi Minor Pertama

Substansi Tata Kelola Dana Desa adalah: implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan besar kepada Kepala Desa untuk mengelola anggaran Dana Desa. Jika Dana Desa dikelola dengan baik, maka akan memberikan manfaat, kesejahteraan, keadilan bagi masyarakat dan dapat meningkatkan status desa menjadi lebih baik.

2). Proposisi Minor Kedua

Realisasi Tata Kelola Dana Desa adalah: Jika melaksanakan prinsip akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi publik secara bersama, maka dapat berimplikasi secara signifikan terhadap output dan hasil yang berdampak positif bagi masyarakat desa.

3). Proposisi Minor Ketiga

Prototype model Tata Kelola Dana Desa yang berdasarkan pada Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi adalah: Jika prototype model dijadikan dasar dalam pengelolaan Dana Desa, maka dapat berkontribusi positif terhadap manfaat program Dana Desa bagi masyarakat desa.

4). Proposisi Mayor

Berdasarkan ketiga proposisi minor di atas, maka dapat disusun proposisi mayor sebagai berikut: Pengelolaan Dana Desa melalui model Tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip Akuntabilitas, transparansi

dan partisipasi secara bersama dengan menekankan aspek moralitas, peningkatan sumber daya manusia, ruang tanyajawab dan pengelolaan data partisipasi publik yang akurat akan berimplikasi terhadap efektifitas dan kemamfaatan program Dana Desa bagi masyarakat.

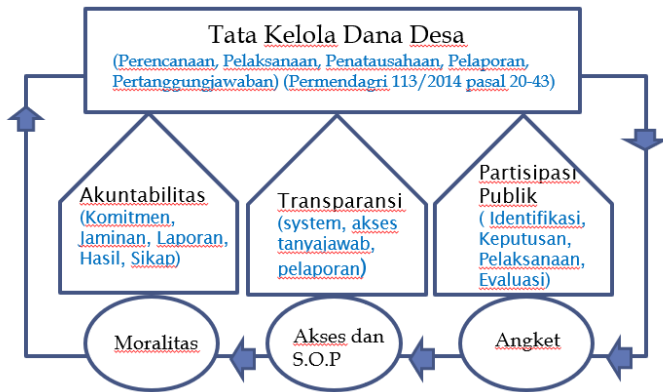
5). *Novelty* (Kebaruan) Temuan Penelitian

Pada saat melakukan penelitian, ternyata belum ada standar tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public, di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti maupun di Desa Betao Riase kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga pengelolaan Dana Desa belum berjalan efektif. Berdasarkan preposisi mayor dari penelitian ini, maka peneliti mengusulkan model ideal tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisi public di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti dan Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pada penelitian ini, merujuk pada perkembangan mutakhir perilaku birokrasi dan Tata Kelola termasuk didalamnya Tata Kelola Dana Desa, khususnya pada pasca Pandemi Covid-19 dan era new normal. Hal ini menunjukkan adanya kebaruaran dalam pengelolaan Dana Desa dengan berkembangnya sebuah konsep dalam bidang administrasi public yang disebut dengan *New Public Governance* (NPG) seperti yang digagas oleh (S. P. Osborne, 2010), bahwa;

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada bagaimana memberikan laporan pertanggungjawaban ataupun memberikan akses informasi. Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana relasi antara pemberi laporan dan penerima laporan, sehingga pertanggungjawaban tercipta bukan karena adanya saling memanipulasi atau sekedar menjawab pertanyaan dan menyiapkan data yang diminta tapi, akuntabilitas berdasar pada adanya hubungan kepercayaan antar para pihak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Tata Kelola Dana Desa sangat dibutuhkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia terutama dalam aspek moralitas atau kejujuran antara pihak pemeriksa dan pihak yang diperiksa. Penegasan pada moralitas berupa adanya fakta integritas, akan menanamkan rasa tanggungjawab bagi seseorang tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada sang pencipta. Pembuatan standar pembuatan baliho akan memastikan adanya ruang dan akses tanyajawab dalam melakukan variasi program serta penyebaran angket untuk memberikan penguatan pada partisipasi public, mulai dari identifikasi sampai pada evaluasi program. Pada model seperti yang ditawarkan pada gambar dibawah, penerapan prinsip akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban dokumen tapi diperlukan moralitas sehingga program tersebut dapat memberikan kemanfaatan.



Gambar 5.3 Prototype Model Tata Kelola Dana Desa
Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik
Sumber: Hasil pengolahan dan analisis penelitian

Penerapan prinsip transparansi diawali dengan adanya moralitas berupa kejujuran dalam memunculkan data usulan program yang dapat diakses dan diverifikasi dengan mekanisme tanya jawab yang interaktif. Penerapan partisipasi publik tidak hanya melibatkan tokoh masyarakat tapi seluruh warga yang diimplementasikan dalam bentuk angket usulan dan evaluasi. Sehingga Tata Kelola Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik dapat merealisasikan program yang berdampak pada perbaikan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Dan hasil penelitian ini merekomendasikan penggunaan model pengelolaan Dana Desa berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public dengan penekanan pada moralitas, akses transparansi dalam bentuk SOP yang melibatkan semua warga dengan cara penyebaran angket.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Tata kelola Dana Desa di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang belum dapat diterapkan secara efektif berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi public karena adanya perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Penerapan prinsip akuntabilitas masih focus pada aspek teknik saja, penerapan prinsip transparansi belum disediakan adanya ruang tanya jawab yang terbuka, penerapan prinsip partisipasi belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang juga belum secara efektif, salah satu penyebabnya karena akses infrastruktur jalan yang masih rusak dan jaringan telekomunikasi belum ada. Penerapan prinsip akuntabilitas masih focus pada penyediaan bukti pengeluaran, penerapan prinsip transparansi masih terbatas pada pemasangan baliho tanpa disediakan ruang tanya jawab terbuka, prinsip partisipasi belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan.
2. Model Tata kelola Dana Desa berdasarkan prinsip Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik, yaitu memperluas cakupan petanggungjawaban, dimulai pada moralitas dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Perluasan transparansi dengan mencantumkan kontak person pada baliho program, dalam hal

partisipasi, adanya angket usulan dan evaluasi program serta membuat pemetaan kondisi sosial masyarakat dalam penggunaan Dana Desa.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan DD di Desa Sipodeceng dan Desa Betao Riase, maka perlu ada peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pembinaan moralitas dan keterampilan serta perbaikan perilaku birokrasi secara terus menerus, terutama sebelum pencairan agar ada kesepahaman antara PTPKD yang menjadi pelaksana dengan Pembina dari Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten. Dan khusus desa yang secara teknis mengalami hambatan langsung pada infrastruktur jalan dan telekomunikasi diperlukan adanya kebijakan khusus agar penggunaan Dana Desa berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan warga secara keseluruhan. .
2. Menyikapi belum adanya model dalam pengelolaan Dana Desa maka, untuk meningkatkan efektifitas. Peneliti merekomendasikan perlunya penggunaan Model Tata Kelola Dana Desa Berdasarkan Prinsip Aluntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik dengan penekanan pada aspek moralitas, pembuatan SOP dan Penyebaran angket di Desa Sipodeceng dan Desa Betao Riase serta desa-desa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arismunandar. (2006). *Manajemen Pendidikan Peluang dan Tantangan*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 150.
- Kuhn, T. (1962). *The Structure of Scientific Revolution*. The University of Chicago Press.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Osborne, D., & Ted, G. (1991). *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government)*. PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance: Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. In *The New Public Governance?: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*.
- Pressman, R. S. (2012). *Rekayasa Perangkat Lunak*. Andi.

Jurnal

- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14.
- Effendy, I., & Sopiah, N. (2017). *Penggunaan Prototyping dalam Pembuatan Aplikasi*. 3, 31–40.
- Razak, M. R. R., & Harfiah, S. (2018). Partisipasi Masyarakat di Daerah Pegunungan Terhadap Perwujudan Good Governance. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 15(3), 476–496. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen>
- Rifdan, Radjab, F., Akib, H., Jasruddin, & Umar, F. (2019). Three Parties Patnership Between BMKG, Government Institution and General Public on Management of Rainfall Observations Networks in South Sulawesi. *International Conference on Public Organization Asia Pacific Society for Public Affairs, August*, 405–421.
- Utomo, K. S., Sudarmo, & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik*, 13(1), 50–66.

<https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/download/22924/16826>
 Wafirotn, K. Z., & Septiviasuti, U. (2019). the Effect of Transparency, Community Participation, and Accountability on Management of Village Funds in Ponorogo Regency. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 31–44. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v14i1.1527>

Posiding

Alfasadun, Pancawati Hardiningsih, sri devi Ratnasari, and Ceacilia Srimindarti. 2018. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” In *SENDU Prosiding*, 684–91. Semarang.

Windyastuti, Lita Yulita Fitriyani, Marita, and Mufida Nur Afifah. 2019. “Accountability and Transparency in Managing Village Funds in Ngawen , Blora , Central Java.” In *Proceeding UII-ICABE*, 177–84. Yogyakarta.

Web Page

Kompas. 2020. “Catatan ICW 2019.” Kompas.Com. 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>. Diakses 27 Mei 2020.

Peraturan Perundang undangan

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4/2020 tentang Tata cara pembagian penetapan rincian dan penggunaan dana desa setiap desa Kab Sidrap Tahun Anggaran 2020

Link

- <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/18%2000:00:00/906/jumlah-deskelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-geografi-2003---2018.html> diakses 27 Juli 2020
- <https://sp2010.bps.go.id/> di akses 27 Juli 2020
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>. Diakses 27 Mei 2020.
- http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Profil/detail_profil/1.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DISERTASI :

Tatakelola Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Publik. (Studi Di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Dan Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang)

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : IR. MUHAMMAD RAIS RAHMAT R, M.SI.
 Nomor KTP : 3275051207680018
 NIM : 181060501007
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Fakultas/Program : Program Doktor Pasca Sarjana
 Universitas : Universitas Negeri Makassar
 Tempat / Tanggal Lahir : Rappang / 12 JULI 1968
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Status Perkawinan : Menikah
 Agama : Islam
 Alamat : A. Sulolipu No. 28 Rappang Kec.Panca Rijang
 Kabupaten Sidenreng Rappang (91651)

DATA KELUARGA

Nama Istri : Indriati Purnamasari, S.H
 Anak ke-1 : Hammam Fauzan Hawari Rais
 Anak ke-2 : Tazkia Ramdhini Rais
 Ayah : Drs. H. Abd. Razak (Alm)
 Ibu : Hj. Siti Rusdiah Thayyeb, B.A (Alm)
 Kakak-1 : Dra. Hj. Rasdiana Razak
 Kakak-2 : Ir. H. Rustam Effendi Razak
 Kakak-3 : Ir. H. Rusman Razak
 Adik-1 : Ir. Hj. Tarbiyani Razak
 Adik-2 : Hj. Rosmaladewi Razak, S.E

DATA HUBUNG

Kontak HP : 081316142449
 Email : mrarisrahmat@gmail.com
 Sinta Id : 6035997
 Orcid Id : <https://orcid.org/0000-0001-7994-6154>
 Google Scholar : 66NvXwsAAAAJ
 Sinta ID : 6035997
 Scopus ID : 57216461021

PENDIDIKAN

Periode	Jenjang	Institusi
2018 –	S3	Program Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar
2009 – 2011	S2	Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45
1986 – 1991	S1	Teknik Mesin Universitas Hasanuddin
1983 – 1986	SLTA	SMA Negeri 157 Rappang Kabupaten
1980 – 1983	SLTP	SMP Negeri 305 Rappang Kabupaten
1974 – 1980	SD	SD Negeri Nomor 6 Rappang
1973 – 1974	TK	TK Aisyiyah 2 Rappang

PENGALAMAN PEKERJAAN

Periode	Pekerjaan
2019 – Sekarang	Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
2019 – Sekarang	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
2017 – 2019	Dosen dan Pengelola Program Magister Ilmu Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang.
2012 – 2017	Dosen Fakultas Teknik Universitas Islam 45 Bekasi
2014 – 2015	G Manager PT Systech Cikarang Bekasi
2009 – 2014	Tenaga Ahli Anggota DPR RI A015 Drs. H. Muchtar Amma,MM. Periode 2009 – 2014
2006- 2009	G. Manager PT HIT Electronic Cikarang Bekasi
2004 –2006	G. Manager PT Taekyung Teknologi Cikarang Bekasi
2002 – 2004	G. Manager PT. Diastarindo Prime Jakarta
1995 – 2002	Senior Manager PT. LG Electronic Cibitung Bekasi
1993 – 1995	Kasi Produksi PT KDS Indonesia Cibitung Bekasi

DATA PUBLIKASI

Jurnal Internasional (Scopus,Copernicus)

No.	Judul	Penulis	Jurnal
1.	The Application Of Good Governance Principles For Performance Improvement Of Uluale Sub-District Office Apparatuses	Muhammad Rais Rahmat Razak, Sailan Manan, Arismunandar Arismunandar, Lutfiah Jafar, Rifdan Rifdan	Journal of The Community Development in Asia (JCDA) . Vol 5, No 3 (2022). DOI: https://doi.org/10.32535/jcda.v5i3.1580 .
2.	Role Of Village-Owned Enterprises In Farming Community Empowerment	Muhammad Rais Rahmat Razak, Sofyan B	International Journal of Advanced Science and Technology. http://serisc.org ... citacy (13) Tahun (2020)

Jurnal Internasional (Non Scopus)

No.	Judul	Penulis	Jurnal
1.	The Effect Of Siri's Marriage On Government Administration	MRR Razak, M Dahong, J Ahmad, H Dema, A Mustanir	International Journal of Sciences: Basic and citacy (20) Tahun (2018) DOI 10.31219/osf.io/yx3n7

Konferensi Internasional (Scopus)

No.	Judul	Penulis	Jurnal
1.	Effects Of ICT Application (Information Communication And Technology) Towards The Transformation Of Regional Bureaucracy	MRR Razak, J Ahmad, A Mustanir, M Madani, A Idhan	IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 717 (1), 012003 citacy (5) Tahun (2021)

Jurnal Nasional

No.	Judul	Penulis	Jurnal
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	MRR Razak, A. Jabbar, Rika Sasmika, Haeruddin S, M.Ikbal	NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Volume 9 Issue 3 Page 459-469 Tahun (2022)
2.	Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan	Nurhatifa Nurhatifa, Muhammad Rohady Ramadhan,	PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan. Volume 9, Issue 3, Pages 173-177. Tahun (2021)

	Dana Desa Lagading Masa Pandemi Covid 19	Muhammad Rais Rahmat	
3	Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kab. Enrekang	Ahmad Mustanir, Muhammad Rais Rahmat Razak, Andi Asrifan	Journal re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management), Volume 4, Issue 2, Pages 119-136. Tahun (2021)
4.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Disiplin ASN Kabupaten Sidenreng Rappang	AA AR, H Syarifuddin, A Jabbar, K Sellang, MRR Razak, M Ibrahim, A Ali	Jurnal Sosial-Politika 2 (1), 65-73 citacy (21) Tahun (2021)
5.	Participatory Rural Appraisal: Transect Dan Matriks Budidaya Pertanian ...	A Mustanir, M Ibrahim, S Sapri, MRR Razak	JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) 4 (5), 703-713 citacy (15) Tahun (2020)
6.	Partisipasi Masyarakat Di Daerah Pegunungan Terhadap Perwujudan Good Governance	MRR Razak, S Harfiah	AKMEN Jurnal Ilmiah. https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php ... citacy (15) Tahun 2018

7.	Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Dengan TI dimasa Pandemi COVID-19	A Mustanir, MRR Razak, A Mursalat	JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) 5 (5), 2246-2258 citacy (9) Tahun (2021)
8	Peranan Camat Dan Komunikasi Pemerintahan Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Malua	A Mustanir, MR Ramadhan, MRR Razak	JCG: Jurnal Clean Goverment 2 (2), 94-114 citacy (9) Tahun 2019

Konferensi Nasional

No.	Judul	Penulis	Jurnal
1.	Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang dalam Musyawarah Rencana Pembangunan	A Mustanir, MRR Razak	KN-6 Asosiasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA) citacy 59 Tahun (2017)
2	Konsep Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Daerah	R Sitonda, MRR Razak, L Tuwu	KN-7 Asosiasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA) Tahun (2018)

3.	Pengaruh Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik Pada Kantor Kec. Buntu Batu Kab Enrekang	Saidiman, S Lubis, MRR Razak, A Mustanir	Prosiding KN-9 APPPTMA 2019 di GKB IV UMM 1 (DOI 10.31219/osf.io/gzec d), 525-541 citacy (4) Tahun (2020)
----	---	--	--

Book Chapter

No.	Judul	Penulis	Penerbit
1.	Governansi digital	Muhammad Rais Rahmat Razak, dkk.	Penerbit: CV. Media Sains Indonesia ISBN : 9786233627269 page 227. Tahun (2022)
2.	Pengantar Ilmu Pemerintahan	Muhammad Rais Rahmat Razak, dkk.	Publisher; Eureka Media ISBN : 9786234870954, page 228 . Tahun (2022)
3.	Pengantar Ilmu Administrasi Publik	Muhammad Rais Rahmat Razak, dkk.	Publisher ; Eureka Media Aksara. ISBN : 9786235382180, page 224. Publication date 2022/4/25 Tahun (2022)
4.	Pelayanan Publik Di Era Tatanan Normal Baru	Muhammad Rais Rahmat Razak, dkk.	Penerbit : CV Media Sains Indonesia ISBN : 9786233623582 Pages vi,290. Tahun (2022)

5.	Good governance dalam pelayanan publik	Muhammad Rais Rahmat Razak, dkk.	Penerbit : CV Media Sains Indonesia ISBN : 9786233625630 Page; 228. (2022)
6.	Pemberdayaan badan usaha milik desa (Bumdes) dimasa pandemi Covid-19	A. Mustanir; MRR,Razak;A . Mursalat ; ed. Irmawati, Adnan	CV. Media Sains Indonesia ISBN:9786233621038 Page 147. Tahun (2021)
7.	Reformasi Administrasi Publik	Muhammad Rais Rahmat Razak, dkk.	Publisher ; Eureka Media ISBN : 9786233620642 Tahun (2021)
8	Tantangan dan strategi : PT di masa pandemi: antologi pemikiran APTISI	Muhammad Rais Rahmat Razak, dkk	Penerbit: CV. De Lamacca ISBN : 9786022631811 227
9.	Jejak pemerintahan Toalala dan silsilah Arung Enrekang.	Muhammad Rais Rahmat Razak, dkk.	Penerbit: CV. Qiara M ISBN : 9786236807576, page 200. Tahun (2021)
10.	Bunga Rampai Kajian Saintifik Islam Sains Teknologi Merubah Peradaban Dunia	Muhammad Rais Rahmat Razak, dkk.	Penerbit CV. Pena Persada ISBN : 9786239375669, Tahun (2020)